

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL

Abdal¹⁾, Agil Raga Hafizh²⁾, Andini Eka Maharani³⁾, Ajeng Laila Qori⁴⁾.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4)}

Email: abdal@uinsgd.ac.id¹⁾, Agilragahafizh123@gmail.com²⁾,
andiniemaharani@gmail.com³⁾, Ajengqori17@gmail.com⁴⁾.

Abstrak

Peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu pemerintah yang biasanya berupa suatu kebijakan. Kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan. Sebagai kaidah normatif kebijakan publik mengandung konsekuensi moral yang selain itu penulis bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik sebagai keputusan moral dan permasalahan yang ada dalam kebijakan-kebijakan publik. Metode penelitian yang dilakukan adalah mengacu pendekatan kualitatif yang merujuk pada pustaka (*library research*) Penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber keputusan lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan. Kemudian, berdampak pada eksistensi dan kinerja pelayanan publik itu sendiri. Sehingga dalam prakteknya kebijakan publik harus diimplementasikan dan dievaluasi. Masalah-masalah yang ada dalam kebijakan publik mengacu pada tipe-tipe kebijakan dan masalah Publik dan kebijakannya. Kebijakan publik sebagai keputusan moral mengacu pada keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan umum, moral individu atau kelompok, pertanggung jawaban administrasi dan analisis etis. Tujuan penulisan ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu para penulis yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Moral, Permasalahan.

Abstract

Regulations made by the authorities, namely the government, are usually in the form of a policy. Publik policies are needed in a country to regulate and manage society, therefore regulations are needed that aim to control and control. As a normative rule of Publik policy, it contains moral consequences, besides that the author aims to examine more deeply about how Publik policy is a moral decision and the problems that exist in Publik policies. The research method carried out is referring to a qualitative approach that refers to the research library (library research). The main object is books or other decision sources. The results of this study explain that Publik policies are needed in a country to regulate and manage society, therefore regulations are needed that aim to control and control. Then, it has an impact on the existence and performance of the Publik service itself. So in practice Publik policy must be implemented and evaluated. The problems that exist in Publik policy refer to the types of policies and Publik problems and policies. Publik policy as a moral decision refers to social justice, citizen participation and aspirations, environmental issues, Publik services, individual or group morals, administrative responsibility and ethical analysis. The purpose of this writing is motivated by the curiosity of the writers who made the writer conduct a research.

Keywords: Publik Policy, Moral, Problem.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik memang sangat menentukan tingkat pelayanan di suatu sistem pemerintahan. Di dalamnya tercantum regulasi aturan yang harus dipatuhi, namun juga sebagai kaidah normatif kebijakan publik mengandung konsekuensi moral yang berdampak pada eksistensi dan kinerja pelayanan publik. Kurang efektifnya kebijakan publik tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan yang diberikan di tingkat bawah.

Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi. Pada awalnya kebijakan publik melalui 2 pendekatan, yakni pendekatan ekonomi dan politik. Namun dalam perkembangannya, semakin disadari bahwa kebijakan publik tidak mudah dirumuskan dan diimplementasikan karena berhadapan dengan perilaku individu target kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan akan menjadi salah ketika pembuat dan pelaksana kebijakan semakin tidak mampu memprediksi perilaku target kebijakan, sehingga tidak jarang kebijakan itu sendiri menjadi terabaikan.

Pada dasarnya, kebijakan publik umumnya berasal dari diskusi dan negosiasi antara pihak yang bersepakat, dimana diskusi dan negosiasi ini kemungkinan memperburuk niat buruk si pembuat kebijakan. Dalam pelayanan publik, lemahnya perilaku etis dapat melemahkan lembaga baik sosial maupun politik dan mempertaruhkan nasib masyarakat. Sejatinya, hakikat utama dari kekuasaan terletak pada ciri kebijakan publik yang merupakan usaha alokasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu pelayanan publik seharusnya dapat menjawab segala macam tuntutan kebutuhan masyarakat banyak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis membuat rumusan masalah yakni: **“Bagaimanakah pengaruh suatu kebijakan publik sebagai keputusan yang mengandung konsekuensi moral”**.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik adalah Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi Kebijakan Publik Sebagai Keputusan-keputusan Yang Mengandung Konsekuensi Moral Keadilan Sosial. Keadilan sosial merujuk kepada masyarakat (*society*) atau negara yang dapat dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. konsep keadilan sosial di satu satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna guna mencapai tujuannya. Bisa disimpulkan bahwa sistem negara ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi. Sesuai dengan prinsip keadilan distributif, keadilan sosial mengandalkan adanya adanya distribusi barang dan sumber-sumber daya secara adil (*the justice of distributing goods and resources*

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah mengacu pendekatan kualitatif yang merujuk pada pustaka (*library research*). Penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber keputusan lainnya. Maksudnya, data yang dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan (Lexy, 2002).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *Public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998), dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *Public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Thomas Dye (1992) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

b. Terminologi Kebijakan Publik

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan Publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara pada amanat rakyat yang berdaulat atasnya.

c. Prinsip-prinsip kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho (2004), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu:

- 1) Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan);
- 2) Cara kebijakan publik diimplementasikan;
- 3) Cara kebijakan publik di evaluasi.

Kebijakan Publik dan Permasalahannya

a. Teori dan Proses Kebijakan Publik

Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik. Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan

oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Analisis kebijakan Publik sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang.

b. Permasalahan Kebijakan Publik

Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang, yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat.

c. Masalah-masalah Publik

Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut diartikulasikan. Masalah-masalah Publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.

Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama, menurut Theodore J. Lowi (1972), masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif. Kategori kedua, didasarkan pada asal-usul masalah. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri. Ciri-ciri pokok kebijakan Publik adalah sebagai berikut.

1. Saling ketergantungan. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff (1974), masalah masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
2. Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Tipe-Tipe masalah kebijakan

Menurut Charles O. Jones (1963) membuat dua tipe masalah publik, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan.
2. Masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan.

Masalah Publik dan Masalah Kebijakan

Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habisnya karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut membuat pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya. Proses tawar-menawar (*bargaining*) antar aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, sering disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (*power*).

Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu per satu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para Lembaga pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk membuat kebijakan. Setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil *assessment* dari masalah publik. Akan tetapi, apakah semua masalah publik adalah masalah kebijakan atau ada yang bukan masalah kebijakan?

Sebuah paradigma kebijakan publik yang kaku (*rigid*) dan tidak responsive akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang responsif akan menghasilkan wajah negara yang responsif pula (Putra F, 2003). Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan Publik.

Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Yang Mengandung Konsekuensi Moral Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan ke depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi.

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat negara memiliki kewajiban moral kepada individu atau kelompok yang terpengaruh oleh aktivitas mereka, sumber yang mendelegasikan kewajiban, perumus kerangka konstitusional dimana aktivitas negara berjalan. Sehingga pembinaan moral yang paling efektif terhadap pejabat pembinaan moral individu sehingga menghasilkan pejabat yang memiliki inisiatif, ketegasan, keberanian, jujur, dan peka terhadap masalah publik.

Keadilan Sosial

Keadilan sosial merujuk kepada masyarakat (*society*) atau negara yang dapat dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. Konsep keadilan sosial di satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya. Bisa disimpulkan bahwa sistem negara kesejahteraan ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Sesuai dengan prinsip keadilan distributif, keadilan sosial mengandalkan adanya distribusi barang dan sumber-sumber daya secara adil (*the justice of distributing goods and resources*). Kebijakan-kebijakan publik harus menjamin pemerataan sumber-sumber daya yang terdapat di suatu negara, dan yang lebih penting ialah bahwa ia harus menguntungkan kelompok atau kelas yang paling tak beruntung yaitu kaum fakir dan miskin.

Setelah merasakan adanya ekses-ekses yang timbul akibat timpangnya distribusi hasil pembangunan, pemerintah kemudian menggariskan rumusan Delapan Jalur Pemerataan bagi proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Kedelapan jalur itu ialah : (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, (2) Pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) Pemerataan distribusi pendapatan, (4) Pemerataan kesempatan kerja, (5) Pemerataan pembangunan, (6) Pemerataan partisipasi dalam pembangunan, (7) Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air, dan (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum.

Partisipasi Dan Aspirasi Warga Negara

Dalam proses pembangunan disegala sektor , aparat negara sering mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi , dan keputusan tersebut dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pertimbangan ekonomis, stabilitas dan security yang kurang memperhatikan pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi warga negara serta partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat hendaknya diperhatikan, tidak saja oleh para pengambil keputusan strategis tetapi juga aparat administrasi dan para birokrat yang langsung berhadapan dengan masalah publik agar supaya mereka memperhatikan kehendak rakyat sebenarnya, sekaligus untuk mendidik masyarakat agar terlibat dalam gerak pembangunan dengan sepenuh hati.

Secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam : Partisipasi dalam pemilihan. Partisipasi untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu. Partisipasi kelompok. Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka, sebagai sarana penengah antara pejabat dan warga negara. (Sakti et al, 2020) Kontak antara warga negara dan pemerintah. Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon, atau pertemuan secara pribadi atau bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga di sebuah kota, atau lokakarya dan konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintahan. Misalnya saja jika terdapat seorang tokoh masyarakat yang didudukkan sebagai wakil rakyat dilembaga-lembaga pembuat kebijakan. Cara lain ialah dengan menggaji client dari suatu program untuk menjadi pelaksana program itu sendiri.

Masalah-Masalah Lingkungan

Kemajuan teknologi dan pembangunan fisik telah membawa kemajuan peradaban manusia yang luar biasa, dan secara keseluruhan kesejahteraan manusia meningkat. Namun akhir-akhir ini industrialisasi dan pembangunan yang kurang terencana dengan baik mulai menimbulkan kekhawatiran berkenaan dengan masalah kelestarian alam dan lingkungan. Meningkatnya taraf hidup manusia membawa tuntutan yang makin tinggi atas berbagai kebutuhan, sementara itu daya dukung alam di bumi (sumber daya alam) tidak pernah akan bertambah. Selain menghadapi masalah alam dan lingkungan juga menghadapi pertumbuhan penduduk yang membawa persoalan pemukiman, perencanaan tata ruang, pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan.

Tampak bahwa kebijakan yang menyangkut lingkungan dan kualitas hidup mengharuskan adanya strategi-strategi yang terpadu. Setidak-tidaknya ada lima aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni Pertama, dari sudut kependudukan, pemerintah harus menyediakan wilayah-wilayah permukiman yang sehat, pembukaan lahan transmigrasi tanpa mengganggu potensi sumber daya alami, atau memperbaiki kualitas hidup dilingkungan kumuh perkotaan. Kedua, masalah lingkungan dapat dilihat dari aspek pembangunan sektoral.

Ketiga, pendekatan masalah lingkungan dari aspek media lingkungan seperti tanah, air, atau ruang. Keempat, masalah lingkungan tidak terlepas dari unsur-unsur penunjang, misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pengaturan aparatur, atau pembebanan biaya terhadap konservasi lingkungan.

Pemerintah dalam hal ini harus tegas dalam menerapkan peraturan yang ada, karena masalah yang dihadapi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomis, yang sekaligus menyelaraskan dengan kehidupan pelestarian flora dan fauna untuk kemaslahatan manusia. Sudah barang tentu para birokrat menanggung kewajiban moral yang besar terhadap masalah lingkungan, karena merekalah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan pengaturan proyek-proyek industri, perizinan lokasi, atau memberi sanksi yang dijatuhkan bagi pencemar lingkungan.

Pelayanan Umum

Pelayanan umum akan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok dan masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayanan umum itu absah adanya.

Tetapi dalam memberikan pelayanan, adanya kurangnya perhatian (*concern*) para aparatur birokrasi terhadap kebutuhan warga negara tersebut diatas, untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja, pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan yang terkadang mengada-ada. Rutinisasi tugas pelayanan umum dan penekanan yang berlebihan kepada pertanggungjawaban formal mengakibatkan adanya prosedur yang kaku dan lamban.

Ketentuan bahwa birokrasi punya kewajiban untuk melayani masyarakat menjadi terbalik, sehingga justru masyarakat yang melayani birokrasi, sikap para birokrat yang tidak bersedia melayani masyarakat secara adil dan merata hampir di semua instansi pemerintah. Sikap pandang organisasi birokrasi pemerintah dan gaya manajemen yang terlalu berorientasi pada tugas (*task oriented*), kegiatan (*activity*) dan pertanggung jawaban (*formal accountability*), kurangnya penekanan pada hasil (*product*) atau kualitas pelayanan (*service quality*), lambat laun akan mengurangi kegairahan dan tantangan untuk melaksanakan pekerjaan organisasi.

Moral Individu Atau Kelompok

Dalam mengambil kebijakan yang baik biasanya menyertakan pengalaman, intuisi, dan hati nurani serta falsafah, kearifan, niat baik akan menjadi penopang paling kokoh bagi para administrator untuk menjaga kewibawaan dan kredibilitas, serta moral (etika). Mempelajari etika berarti memahami sifat dasar tindakan manusia, pertentangan moral yang ada di batinnya, pertimbangan moral yang mendasarinya, kesadaran moral (*moral consciousness*) yang menuntun perilakunya, kewajiban-kewajiban moral mereka sebagai makhluk yang paling sempurna, dan juga kelakuan moral (*moral conduct*) yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Etika administrasi ingin mengkaji lebih dalam makna filosofis yang terdapat dibelakang setiap tindakan pejabat negara dan sekaligus merumuskan standar norma yang wajib diikuti oleh mereka yang berkecimpung dalam tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Persoalan etis ternyata selalu muncul dalam hubungan antara negara, administrator, birokrat, pihak swasta maupun masyarakat awam. Administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tampaknya merupakan bidang kegiatan yang rawan terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan keuangan, dan

pemanfaatan jabatan untuk tujuan yang tidak bermoral. Ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan para pejabat negara : Aspek lazim yaitu cara-cara dimana kebijakan dan praktek pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung sikap-sikap dan titik tinjauan yang memungkinkan tanggung jawab atas kinerja , memperhitungkan kepentingan banyak pihak, pejabat-pejabat atasan, mandat legislatif, dan akhirnya kesejahteraan publik yang akan menjadi kewajiban pegawai-pegawai negeri serta mempengaruhi perilaku mereka. Aspek terbatas yaitu cara-cara dimana pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan yang masuk akal itu sendiri dilaksanakan.

Moral individu mensyaratkan bahwa dalam hubungannya dengan orang lain seseorang harus mengikuti norma-norma etis dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pertanggungjawaban antar manusia. Sedangkan moral kolektif terbentuk karena bergabungnya pertanggungjawaban di dalam suatu kelompok sehingga proses tindakan-tindakan etis yang terwujud itu terbentuk karena, persetujuan antara individu-individu yang terdapat didalamnya.

Pertanggungjawaban Administrasi

Pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya.

Akan tetapi dalam administrasi publik pertanggungjawaban mengandung tiga konotasi yakni: (Angara,S,2014)Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas. Terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggung jawaban seorang pejabat negara manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap aparatur negara secara implisit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. (Engkus,E,2017))Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat. Pertanggungjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa suatu lembaga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban. Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu. Tipe-tipe sistem pertanggungjawaban:

1. Pertanggungjawaban birokratis adalah mekanisme yang secara luas dipakai untuk mengelola kehendak-kehendak lembaga negara.
2. Pertanggungjawaban legal adalah mirip dengan bentuk birokrasi karena ia juga melibatkan penerapan kontrol yang terus menerus atas aktivitas administrasi negara.
3. Pertanggungjawaban profesional, dicirikan oleh penempatan kontrol atas aktivitas-aktivitas organisasional ditangan para pejabat yang punya kepakaran atau keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
4. Pertanggungjawaban politis merupakan sistem pertanggungjawaban yang sangat dibutuhkan bagi administrator di negara-negara demokratis.

Analisis Etis

Analisis Etika Kebanyakan orang merusak atau merugikan adalah salah *All harmful acts are wrongful acts*. Salah satu kekuatan pokok dari aturan-aturan yang terdapat dalam etika dan moral adalah kemampuannya untuk menemukan kaidah-kaidah penting di luar aturan aturan atau hukum yang berlaku. akan sependapat bahwa setiap perbuatan yang Urusan urusan

publik akan dapat mencapai tujuannya apabila konsep moralisme legal mendasari tindakan dan keputusan yang diambil oleh para pejabat hendaknya berangkat dari asumsi bahwa hukum dan aturan senantiasa terlambat jika dibandingkan dengan berkembangnya.

Tidak Mudah untuk menilai tindakan-tindakan seseorang, apakah sudah sesuai dengan norma etika atau belum. Apalagi kalau tindakan tersebut berproses melalui serangkaian keputusan yang panjang. Konsep moralisme legal dapat dirumuskan dari dua sisi tuntutan yang menyangkut tindakan manusia yaitu: (Anggara,S, 2014) Sisi "moralis", bahwa tindakan-tindakan tertentu memang secara intrinsik dapat disebut salah. (Engkus,E,2017) Sisi "legal", bahwa tindakan-tindakan yang salah adalah tindakan-tindakan yang ilegal .

E. SIMPULAN

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan publik memiliki beberapa permasalahan, Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang, yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat.

Kebijakan publik sebagai keputusan moral ini penting adanya karena untuk menjalankan tugasnya, pejabat negara harus memiliki kewajiban moral yang kepada individu atau kelompok, pembinaan moral yang paling efektif terhadap pejabat adalah pembinaan moral individu sehingga menghasilkan pejabat yang memiliki ketegasan, keberanian, jujur, inisiatif dan peka terhadap masalah publik. Masalah ini diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidak

REFERENSI

- Anggara, Sahya. 2014. "*Kebijakan Publik.*" Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2003. "*Analisis Kebijakan Publik.*" Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, George C. 1980. "*Implementing Publik Policy.* Washington DC: Congressional Quarterly Press."
- Engkus, E. 2017. "*Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi.* JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik". 7(1), 91-101.
- Engkus, E. 2012. "*Menuju Birokrasi yang Populis dan Reseptivitas di Era Otonomi Daerah.*" (10), 1-15.
- Islamy, M.Irpan. 1997. "*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta: Sinar Grafika".
- Nugroho, Rian. 2003. "*Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi.* Jakarta: Media Komputindo."
- Sakti, F. T., Engkus, E., & Afrilia, A. 2020. The Contribution of "Rumah Susun" Retribution Toward Regional Original Income. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 36(2), 391-400.

Syafei, Inu Kencana. 1992. "Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama
Tangkilisan, Hessel. 2003. Implementasi Kebijakan Publik". Yogyakarta:Lukman
Offset.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. "Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara". Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. "Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media press".